

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Tahun 2020

L
K
j
i
P



2020



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No.24, Teluk Betung, Bandar Lampung

Website : www.pta-bandarlampung.go.id, email : pta_bandarlampung@yahoo.co.id

Telp.(0721) 489813 Fax. (0721) 476054,

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik. Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Demikian pula halnya dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholders*. Hal tersebut juga sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen penetapan Kinerja.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara Periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai penunjukan kewajiban Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan program serta kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Paparan LKjIP ini merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah memuaskan. Selanjutnya kami mengharapkan kiranya LKjIP Tahun 2020 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandat dan *stakeholders*.



Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kedepan. Perubahan untuk mencapai kesempurnaan merupakan pekerjaan rumah yang harus kami lakukan, sehingga kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKjIP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*). Diharapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Semoga LKjIP Tahun 2020 ini selain berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*, dapat juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban publik atas amanah yang diemban oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



KETUA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung,


Ds. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19550816 198103 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi & Wewenang Organisasi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Manusia.....	9
E. Sumber Pendanaan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	11
B. Rencana Kinerja 2020.....	17
C. Perjanjian Kinerja 2020.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	33
B. Saran	36
Lampiran – lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 - 2024. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) tahunan. Tahun 2020 merupakan tahun kedua penjabaran Renstra Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung periode 2020 - 2024.

Pada Tahun 2020, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Yustisial, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai Pengadilan Tingkat Banding melalui serangkaian kegiatan dari mulai penerimaan perkara, proses persidangan dan pelaporan perkara.

Pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja kepaniteraan dan kesekretariatan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Di samping itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penetapan rukyatul- Alhilar dan sebagainya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung saat ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Adapun tugas dan fungsinya masing-masing secara garis besar sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan MARI dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merencanakan dan melaksanakan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan MA RI dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara banding dan melakukan pembinaan serta pengawasan peradilannya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi

Kepaniteraan;

- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

5. Panitera Muda Banding PTA Bandar Lampung

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju;
- f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum PTA Bandar Lampung

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Penetapan Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Kesekretariatan PTA Bandar Lampung

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

8. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Bandar Lampung

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai dua sub bagian, yakni :

- a. Sub bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- b. Sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan

tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

9. Bagian Umum dan Keuangan PTA Bandar Lampung

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai dua sub bagian, yakni :

- a. Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- b. Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik

negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, didukung sumber daya manusia yang berjumlah 60 orang, Sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Statistik Sumber Daya Manusia
pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ketua	-	1	Pejabat Negara
2	Wakil Ketua	-	1	Pejabat Negara
3	Hakim Tinggi	-	7	Pejabat Negara
4	Panitera	Eselon II/a	1	Fungsional
5	Sekretaris	Eselon II/b	1	Struktural
6	Kepala Bagian	Eselon III/a	2	Struktural
7	Panitera Muda	Eselon IV/a	2	Fungsional
8	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	4	Struktural
9	Panitera Pengganti	-	11	Fungsional
10	Jabatan Fungsional	-	2	-
11	Pelaksana		12	-
11	Tenaga Kontrak	-	16	-
TOTAL			60	

E. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dibagi kepada DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) sebesar Rp. 14.562.997.000,- dan DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI) sebesar Rp. 173.615.000,- sebagaimana dalam Tabel di bawah ini :

PAGU ANGGARAN TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
(dalam rupiah)

PROGRAM JENIS BELANJA	PAGU DIPA 2020
DIPA 01 (BUA)	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG	
- Belanja Pegawai	10.589.672.000
- Belanja Barang Operasional	3.064.721.000
- Belanja Barang Non Operasional	343.604.000
JUMLAH	13.997.997.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG	
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	25.000.000
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	244.000.000
- Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	296.000.000
JUMLAH	565.000.000
JUMLAH DIPA 01	14.562.997.000
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	
- Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama	44.148.000
- Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	45.367.000
- 055 Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non Hakim	84.100.000
JUMLAH DIPA 04	173.615.000
TOTAL DIPA	14.736.612.000

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2020 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menyusun Renstra tahun 2020 – 2024 yang telah diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung RI periode 2020 – 2024 yang mengalami perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya.

Dalam tahun 2020 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah agung RI, mempunyai tugas untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan. Rencana Strategis tersebut dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2020, dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2020. Lebih lanjut Renstra Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk tahun 2020 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan

fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung dan Modern di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung”

Pernyataan visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Badan Peradilan Agama menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di bawahnya. Kata Badan Peradilan Agama digunakan untuk membedakannya dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;
- c. Modern menunjukan suatu sifat sesuatu yang baru berlaku pada masa kini. Dengan kata lain Modern juga berarti progresif dan dinamis.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi :

- 1 *Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi;*
- 2 *Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan;*
- 3 *Melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien;*
- 4 *Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.*

3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
3. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

7. Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama (*outcome*) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan indikator kinerja yang menunjukkan peran utama Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Indikator kinerja utama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK
		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

6. Program dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja tahun 2020. Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan indikator kinerja utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator kinerja *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja *output*.

Program Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Banding
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

6. Bimbingan Teknis atau Pembinaan Penanganan Penyelesaian Perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang meliputi :

1. Layanan Perkantoran (Pengelolaan gaji, tunjangan, Uang Makan, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).
2. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran).

Dengan Penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat lebih terarah dan terdapat tolak ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Penetapan Kinerja tahun 2020 juga merupakan komitmen seluruh unsur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Program Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Program jangka menengah pengadilan tinggi agama bandar lampung meliputi 2 bagian meliputi bidang kepaniteraan dan bidang

kesekretariatan yaitu :

1. Bidang kepaniteraan

- a. Peningkatan tata kelola pemungutan dan Penyetoran PNPB
- b. Penyeragaman Panjar Biaya eksekusi
- c. Pemantapan prosedur Mediasi sesuai standar Badilag Sewilayah PTA Bandar Lampung
- d. Peningkatan pengetahuan dan implementasi APM diseluruh wilayah PTA Bandar Lampung

2. Bidang Kesekretariatan

- a. Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu bidang kesekretariatan
- b. Penempatan Pegawai yang Sesuai dan Komposisi yang berimbang
- c. Peningkatan penelaahan, penyusunan dan pemrosesan Pagu minus belanja pegawai
- d. Peningkatan dan penyempurnaan matriks rencana penarikan DIPA 01 dan DIPA 04

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

**Tabel 2.2. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	0%
		b	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c	Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	100%
		d	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	100%
		b	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah perkara diputus	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2020 di atas, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	0%
		b Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi • PK	100%
		d Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding	92%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	100%
		b Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah perkara diputus	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari dapat dicapainya sasaran strategis setelah diukur dengan mengaplikasikan seluruh indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran dapat disajikan pada

tabel berikut ini :

**Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Tahun 2020**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	0%	0%	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%		100%
		c. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi • PK	100%	- 2017 : 1.456.006.000 - 2018 : 1.436.656.000 - 2019 : 1.487.076.000	100%
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding	90%	- 2017 : 1.456.006.000 - 2018 : 1.436.656.000 - 2019 : 1.487.076.000	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	100%	0	100%
		b. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah perkara diputus	100%	- 2017 : 1.456.006.000 - 2018 : 1.436.656.000 - 2019 : 1.487.076.000	100%

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap indikator kinerja utama dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya sasaran Rencana Strategis tahun 2020.

Analisis tentang sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Rencana Strategis, disajikan sebagai berikut:

	Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
---	--

Tabel 3.2:
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	0%	0%	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	100%	81%	81%
		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90%	94%	104%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

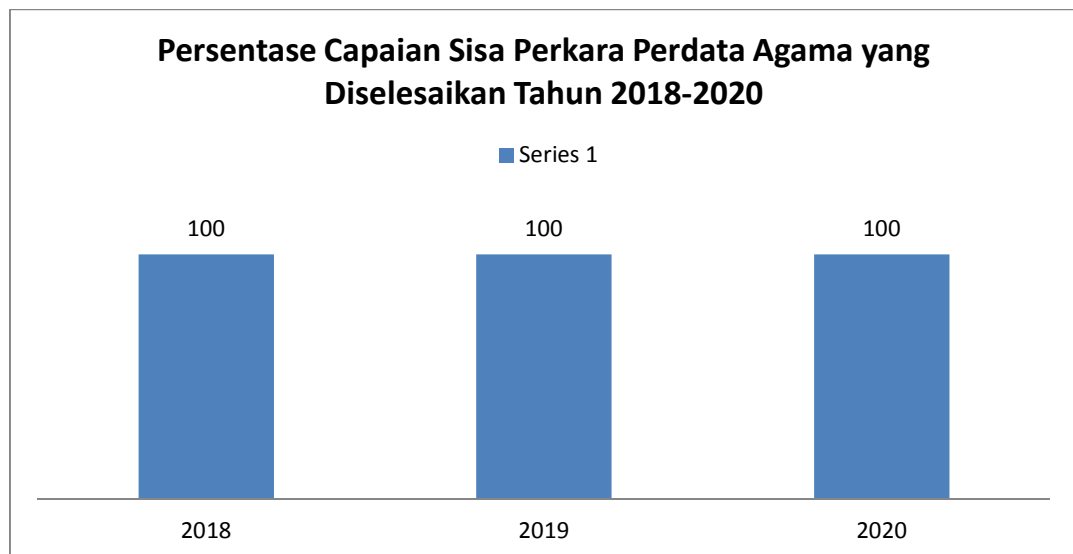
Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara perdata agama di tahun 2020.
- Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Tabel 3.3.
Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	0%	0%	100%	100%	100%



Grafik 3.1.
Capaian Sisa Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2018-2020

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1**Persentase Sisa Perkara perdata agama Yang Diselesaikan**

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3.4.

Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2018	Perdata Agama	0	0	0%	0%	100%
2019	Perdata Agama	0	0	0%	0%	100%
2020	Perdata Agama	0	0	0%	0%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara di tahun berjalan, sehingga tidak ada menyisakan perkara di tahun berikutnya (Tabel 3.5.).

**Tabel 3.5. Keadaan Perkara
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2019 -
2020**

JENIS PERKARA	SISA THN LALU			MASUK			JUMLAH PERKARA			PUTUS			SISA AKHIR		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Cerai Talak	-	-	-	10	11	8	10	11	8	10	11	8	-	-	-
Cerai Gugat	-	-	-	14	25	22	14	25	22	14	25	22	-	-	-
Harta Bersama	1	-	-	5	3	11	6	3	11	6	3	11	-	-	-
Penguasaan Anak	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-

JENIS PERKARA	SISA THN LALU			MASUK			JUMLAH PERKARA			PUTUS			SISA AKHIR		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Isbath Nikah	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Kewarisan	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
Hibah	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	2	1	-	-	-
Lain-lain/Derden Verzet	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	32	44	47	33	44	47	33	44	47	-	-	-

Sisa perkara perdata agama sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah 0 (nol) perkara. Dari jumlah tersebut maka tidak ada sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2020 sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa target **telah tercapai**. Evaluasi untuk pencapaian nilai maksimal pada indikator “persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan” di tahun mendatang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung harus terus mempertahankan kinerjanya untuk tidak menyisakan perkara di tahun berikutnya (*Zero Pending Case*) sehingga capaian terhadap indikator ini dapat meraih 100% kembali.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat banding adalah Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.6.
Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	Cerai Talak	10	10	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	14	14			
	Harta Bersama	7	7			
	Kewarisan	2	2			
2019	Cerai Talak	11	11	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	25	25			
	Harta Bersama	3	3			
	Kewarisan	2	2			
	Hibah	2	2			
	Lain-lain/ Derden Verzet	1	1			
2020	Cerai Talak	8	8	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	22	22			
	Harta Bersama	11	11			
	Penguasaan Anak	2	2			
	Isbath Nikah	1	1			
	Kewarisan	2	2			
	Hibah	1	1			

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 47 perkara, perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak 47 perkara.

Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dan capaiannya sebesar 100%. Jumlah ini tetap dari tahun sebelumnya karena seluruh perkara dapat diselesaikan tepat waktu.

Dengan demikian indikator “persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” dapat **tercapai** karena Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung secara konsisten menekankan pentingnya penyelesaian perkara tepat waktu guna peningkatan kinerja pelayanan pengadilan dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Rapat evaluasi terhadap indikator ini dilakukan setiap minimal tiga bulan sekali dengan cara memantau penyelesaian perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga diharapkan capaian indikator penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terus dipertahankan.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi :

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7.
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2018	33	9	24	80%	73%	91%
2019	44	5	39	80%	89%	99%
2020	47	9	38	100%	81%	81%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 38 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 47 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 81 %, maka capaiannya adalah sebesar 81%. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya karena target jangka pendek untuk indikator ini ditingkatkan. Namun di samping itu secara kuantitatif perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi juga menurun, hal ini dapat disebabkan adanya peningkatan perkara putus di tahun 2020.

Evaluasi yang dapat dilakukan terhadap indikator ini adalah : perlu dilaksanakan diskusi hukum dan *coffee morning* minimal sebulan sekali untuk membahas masalah-masalah teknis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan dan tentunya meningkatkan akseptibilitas putusan. Apabila upaya tersebut telah dilakukan dan secara konsisten tetap terjadi penurunan capaian indikator ini, maka perlu dilakukan review matriks target jangka menengah 2020-2024 karena diperkirakan perkara masuk akan terus meningkat setiap tahunnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4 **Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Peradilan tingkat Banding**

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020 adalah 3,6 dengan nilai konversi 90,34.
- Dari survey yang telah dilakukan pada tahun 2018 s.d. 2020 Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, mayoritas adalah

peradilan tingkat pertama dalam wilayah hukumnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8.
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020-2018

Tahun	Jumlah Responden Tingkat Pertama	Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Peradilan tingkat Banding	Target	Realisasi	Capaian
2018	170	127	100%	75%	75%
2019	124	91	100%	73%	73%
2020	176	165	90%	94%	104%

Catatan :

Realisasi = Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Peradilan tingkat Banding / Jumlah Responden Tingkat Pertama

Capaian = realisasi / target

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 94% dengan capaian 104 %

Tahun 2020 Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Peradilan tingkat Banding **capaiannya telah melebihi target**. Hal ini disebabkan karena telah efektifnya pelaksanaan PTSP diantaranya telah dilakukan DDTK secara berkala terhadap petugas PTSP mulai dari satpam hingga petugas *front-office* yaitu : Meja Pengaduan, Meja Informasi, Pelayanan Surat Kepaniteraan dan Pelayanan Surat Kesekretariatan, adanya buku tamu elektronik (SIBUDI). Disamping itu adanya dukungan SDM yang cakap dimana berdasarkan hasil survey mayoritas jenis layanan yang responden pernah terima adalah pelayanan konsultasi informasi mengenai prosedur beracara/mengajukan upaya hukum (45 responden) dan pelayanan kepegawaian (45) menurut hasil responden menunjukkan penilaian yang lebih

dari memuaskan.

Evaluasi terhadap indikator ini kedepan akan terus dimonitoring dan dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan pada pengadilan tingkat pertama dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan Mahkamah Agung ataupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

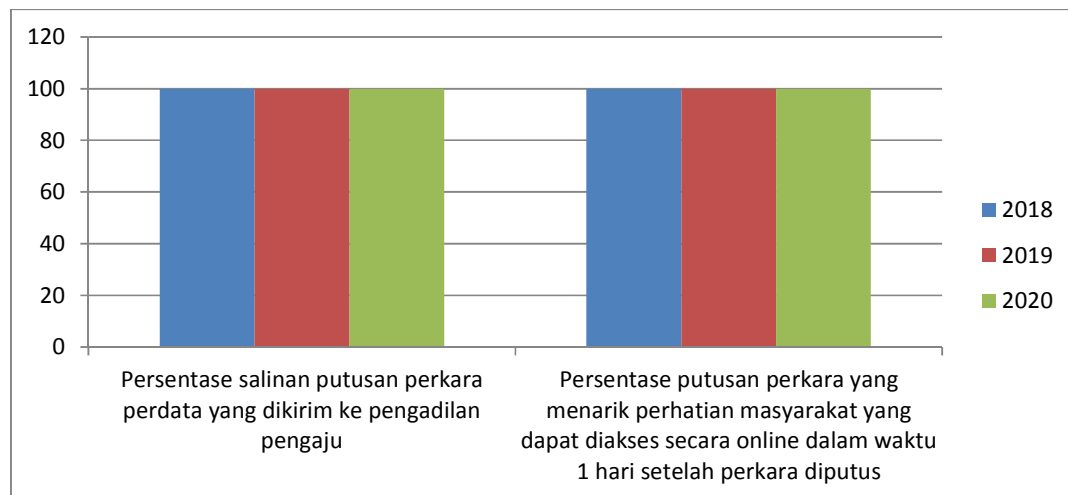
Tabel 3.9

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2019	2020
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	100%	100%

Grafik 3.2.

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2018-2020



Sasaran 2 Indikator ke 1**Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim ke pengadilan pengaju**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 3.10
Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang dikirim ke pengadilan Pengaju
Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2018	33	33	100%	100%	100%
2019	44	44	100%	100%	100%
2020	47	47	100%	100%	100%

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 47 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama adalah sebanyak 47 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %.

Tercapainya Target Indikator ini karena didukung dengan SOP Kepaniteraan mengenai Pengembalian Berkas Bundel A dan Pengiriman Putusan Akhir dengan Kode Dokumen : SOP/AP/11 Tanggal 1 Maret 2018 yang masih digunakan sampai dengan sekarang.

Evaluasi terhadap indikator dapat dilakukan dengan melakukan rapat review SOP Kepaniteraan mengenai Pengembalian Berkas Bundel A dan Pengiriman Putusan Akhir tersebut apakah masih relevan dengan sistem dan kebijakan terbaru.

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.11.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	100%	100%	100%
2019	0	0	100%	100%	100%
2020	0	0	100%	100%	100%

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %

Sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam IKU bahwa yang dimaksud perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara-perkara mengenai Ekonomi Syariah. Selama 3 (tiga) tahun terakhir belum pernah ada putusan banding mengenai Ekonomi Syariah. Sehingga target dianggap telah tercapai.

Evaluasi yang dapat dilakukan terhadap indikator ini adalah : aparaturnya pengadilan yang menangani publikasi putusan harus dapat memastikan putusan tersebut dapat diakses dalam waktu 1 (satu) hari setelah putusan, dan mengikuti SOP Publikasi Putusan yang telah ditetapkan yaitu maksimal 40 menit.

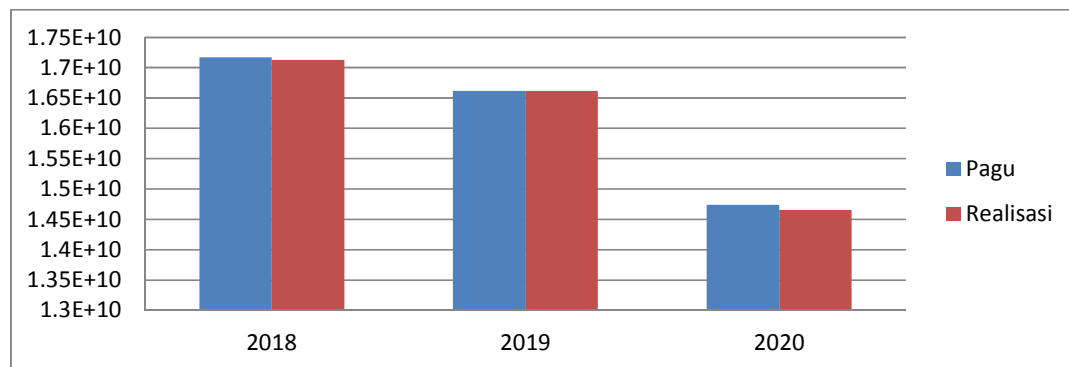
B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebesar Rp 18.095.937.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena adanya efisiensi anggaran secara nasional untuk dialihkan sebagai penanggulangan covid-19 sehingga pagu anggaran menjadi Rp 14.562.997.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 14,650,192,312.00,- atau sebesar 99%. Persentase realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tahun 2020 meraih angka yang relatif tetap selama 3 (tiga) tahun terakhir. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.13.

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2018 s.d. 2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	17.170.719.000	17.124.226.151	99,7
2	2019	16.746.200.000	16.617.752.097	99,2
3	2020	14.736.612.000	14.650.192.312	99,4



Grafik 3.3. Pagu dan Realisasi Anggaran DIP Tahun 2018 s.d. 2020

Tabel 3.14.

Rincian Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2018 s.d. 2020

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		Ket
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A DIPA – 01								
I.	005.01.0 1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	14.562.997.000	14.087.119.312	96.73	476.063.053	3.27	
	056	Pembinaan/Sosialisasi Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	343.604.000	343.498.572	99,97	105.000	0.03	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	10.589.672.000	10.149.822.695	95,85	440.035.089	4.16	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.064.721.000	3.030.725.045	98.89	33.995.955	1.11	
II.	005.01.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	556.000.000	563.073.000	99.66	1.927.000	0.34	
	1.071 (052)	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	25.000.000	25.000.000	100	0	0.00	
	1.071 (053)	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	244.000.000	243.400.000	99.75	600.000	0.25	
	1.071 (054)	Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan	296.000.000	294.673.000	99.55	1.327.000	0.45	
JUMLAH			14.562.997.000	14.087.119.312	96.73	476.063.053	3.27	
B DIPA – 04								
I	005.04.0 8	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	173.615.000	173.514.500	99.94	100.500	0.06	
	053	Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama	44.148.000	44.071.500	99.83	76.500	0.17	
	054	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	45.367.000	45.343.000	99.95	24.000	0.05	
	055	Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non Hakim	84.100.000	84.100.000	100	0	0	
JUMLAH			173.615.000	173.514.500	99.94	100.500	0.06	

Realisasi sebesar Rp 14.650.192.312,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	655.356.000,-	655.356.000,-	100
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	133.957.000,-	133.957.000,-	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung periode tahun 2020. Pada awal tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah menetapkan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. KESIMPULAN

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang merupakan pengadilan tingkat banding bagi Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, sehingga akan terwujud peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi pedoman bagi para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan implementasi pertanggung jawaban, karena LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melaporkan capaian kinerja selama tahun 2020. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini merupakan upaya penggambaran secara kongkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan Kinerja ini masih sangat perlu disempurnakan. Semoga laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. SARAN

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

- 1) Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan termasuk pemantauan tindak lanjut secara berkesinambungan.
- 2) Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (*standar operasional prosedur*).
- 3) Memberikan arahan kepada Pengadilan Agama yang berada di bawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
- 4) Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.
- 5) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian

- perkara.
- 6) Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai *instrument* objektif yang tidak berpihak.
 - 7) Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *instrument punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan *instrument* lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
 - 8) Keterbukaan di dalam memberikan data yang akurat untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
 - 9) Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem LKjIP pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - a) Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b) Mempersiapkan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan *outcome*, sehingga Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
 - 10) Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2020 – 2024.

- 11) Capaian Sasaran dalam LKjIP tahun 2020 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya di masa mendatang.
- 12) Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LKjIP tahun 2020 ini merupakan wujud kesungguhan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan. LKjIP ini juga merupakan wujud introspeksi diri terhadap amanah yang diemban.

Sebagai penutup, pimpinan beserta segenap Hakim Tinggi dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berharap dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. LKjIP ini pula diharapkan dapat memenuhi kewajiban penerapan akuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : W8-A/2141 / OT.01.2 / 11 / 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa pejabat/pegawai sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Negara / Lembaga;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.1.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sakip pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Nomor: 1/PTA/SK/OT.01.2/1/2020 tanggal 2 Januari 2019;
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun tersebut bertugas:
1. Menyusun Laporan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan berpedoman kepada Petunjuk Mahkamah Agung RI;
2. Mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dalam penyusunan tersebut;
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling lambat pada tanggal 5 Februari 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada tanggal : 30 November 2020

Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19550816 198103 1 004

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Nomor : W8-A/ 214 / KP.05.1 / 11 / 2020
Tanggal : 30 November 2020
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
Ketua : Drs. PAHRI HAMIDI
Wakil Ketua : HENDRIANSYAH, S.H., M.H.
Sekretaris : Drs. ERWIN ROMEL, M.H.

Tim Penyusun Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020.

Koordinator : H. AHMAD SYAHAB, S.H. M.H.
Anggota : 1. MEDI EFENDI, S.Pd., M.H.
2. Dra. ISMIWATI, M.H.
3. H. NASRON HUSEIN, S.H.
4. HASBI HAMZAH, S.H.
5. Drs. RIDUANSYAH .
6. ANDI APRIYANTO, S.H.
7. PEBRIAN EKO SAPUTRA, A.Md.

Tim Penyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.

Koordinator : YOSRINALDO SYARIEF, S.H., M.H.
Anggota : 1. HARDINI TAWANGSARI, S.Si., M.H.
2. DESTIA FAUZI SODRI, S.E., M.M.
3. MARIA NAVRATILOVA, S.E., M.H.
4. KRISTINA MELLYZA, S.A.N., M.M.
5. LUTFI MEDIANSYAH, S.T., M.T.

Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja tahun 2021.

Koordinator : UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
Anggota : 1. MUHAMMAD AGUS WIBOWO, S.H., M.H.
2. RESTU YUNIARTI, S.Kom., S.H., M.M.
3. FIKRI, S.E., M.M.
4. BUDIYANTO, S.H.



Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada tanggal : 30 November 2020

Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19550816 198103 1 004

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (547678) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
ALOKASI Rp.14,562,997,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			13,997,997,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			13,997,997,000	
1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.0 Layanan		343,604,000	
	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG				
1066.970.001	Tanpa Sub Output			343,604,000	
056	Pembinaan/Sosialisasi Tingkat Banding ke Tingkat Pertama			343,604,000	
A	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan			90,272,000	
521211	Belanja Bahan			15,272,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Seminar Kit [40 Org x 1 Keg]	40.0 OK	300,000	12,000,000	
	- Spanduk	1.0 KEG	1,350,000	1,350,000	
	- ATK	1.0 KEG	1,922,000	1,922,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			9,100,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang Narasumber Eksternal	7.0 JAM	800,000	5,600,000	
	- Uang Narasumber Internal	7.0 JAM	500,000	3,500,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			2,500,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang Narasumber Internal Virtual Meeting	5.0 JAM	500,000	2,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6,500,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Transportasi Luar Kota [26 Org x 1 PP]	26.0 OK	250,000	6,500,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			56,900,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Akomodasi (Fullboard) Panitia dan Peserta [40 Org x 2 Mlm x 1 Keg]	80.0 OM	490,000	39,200,000	
	- Uang Saku [40 Org x 3 Hari x 1 Keg]	120.0 OH	130,000	15,600,000	
	- Transportasi Dalam Kota [14 Org x 1 PP]	14.0 OK	150,000	2,100,000	
B	Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Program dan Anggaran			90,272,000	
521211	Belanja Bahan			14,872,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Seminar Kit [40 Org x 1 Keg]	40.0 OK	300,000	12,000,000	
	- Spanduk	1.0 KEG	1,350,000	1,350,000	
	- ATK	1.0 KEG	1,522,000	1,522,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			11,000,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang Narasumber Eksternal	10.0 JAM	800,000	8,000,000	
	- Uang Narasumber Internal	6.0 JAM	500,000	3,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			1,000,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang Narasumber Internal Virtual Meeting	2.0 JAM	500,000	1,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6,500,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (547678) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
ALOKASI Rp.14,562,997,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	- Transportasi Luar Kota [26 Org x 1 PP]	26.0 OK	250,000	6,500,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>			56,900,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Akomodasi (Fullboard) Panitia dan Peserta [40 Org x 2 Mlm x 1 Keg]	80.0 OM	490,000	39,200,000	
	- Uang Saku [40 Org x 3 Hari x 1 Keg]	120.0 OH	130,000	15,600,000	
E	- Transportasi Dalam Kota [14 Org x 1 PP]	14.0 OK	150,000	2,100,000	RM
	<u>Pembinaan Sosialisasi ke Tingkat Pertama</u>			159,840,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			149,760,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang Harian [4 Org x 2 Hari x 39 Keg]	312.0 OH	330,000	102,960,000	
524113	- Penginapan [4 Org x 1 Hari x 39 Keg]	156.0 OK	300,000	46,800,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			10,080,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang harian [4 Org x 1 PP x 16 Keg]	64.0 OK	150,000	9,600,000	
	- Uang harian [4 Org x 1 PP x 1 Keg]	4.0 OK	120,000	480,000	
F	<u>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS</u>			3,220,000	RM
	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			960,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Makan [8 Org x 2 Hari]	16.0 OK	40,000	640,000	
	- Kudapan [8 Org x 2 Hari]	16.0 OK	20,000	320,000	
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u>			500,000	RM
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Face Shield	10.0 OK	15,000	150,000	
	- Handsanitizer	1.0 BTL	50,000	50,000	
	- Masker	1.0 KTK	150,000	150,000	
524113	- Sarung Tangan	1.0 KTK	150,000	150,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			1,760,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang Transport [8 Org x 2 Hari]	16.0 OK	110,000	1,760,000	
1066.994	<u>Layanan Perkantoran</u>	1.0 Layanan		13,654,393,000	
1066.994.001	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG				RM
	Tanpa Sub Output			13,654,393,000	
	Gaji dan Tunjangan			10,589,672,000	
	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>			10,589,672,000	
	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>			2,829,000,000	
A	(KPPN.017-Bandar Lampung)				RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	2,509,049,000	2,509,049,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	197,629,000	197,629,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	122,322,000	122,322,000	
	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>			50,000	
511119	(KPPN.017-Bandar Lampung)				RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	46,000	46,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (547678) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
ALOKASI Rp.14,562,997,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511121	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) <u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 BLN	2,000	2,000 201,000,000	RM
511122	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS - Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 14) <u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	179,864,000 13,720,000 7,416,000	179,864,000 13,720,000 7,416,000 50,800,000	RM
511123	- Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) <u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	44,798,000 3,436,000 2,566,000	44,798,000 3,436,000 2,566,000 80,922,000	RM
511124	- Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) <u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	72,102,000 4,680,000 4,140,000	72,102,000 4,680,000 4,140,000 5,758,000,000	RM
511125	- Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) <u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	5,331,830,000 419,290,000 6,880,000	5,331,830,000 419,290,000 6,880,000 1,060,300,000	RM
511126	- Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) <u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	932,966,000 125,826,000 1,508,000	932,966,000 125,826,000 1,508,000 109,600,000	RM
511129	- Belanja Tunj. Beras PNS <u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 THN	109,600,000	109,600,000 457,600,000	RM
511151	- Belanja Uang Makan PNS <u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 THN	457,600,000	457,600,000 42,400,000	RM
002	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	36,335,000	36,335,000	
A	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,945,000	2,945,000	
521111	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) Operasional dan Pemeliharaan Kantor <i>KEBUTUHAN SEHARIHARI PERKANTORAN</i> <u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)	1.0 BLN	3,120,000	3,120,000 3,064,721,000 546,687,000 432,230,000	RM
	- Pramubakti (7 ORG X 13 BLN)	91.0 OB	1,850,000	168,350,000	
	- Pengemudi (5 ORG X 13 BLN)	65.0 OB	2,040,000	132,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (547678) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
ALOKASI Rp.14,562,997,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	- Satpam (4 ORG X 13 BLN)	52.0 OB	2,040,000	106,080,000	RM
	- Langganan Surat Kabar Berita Majalah	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
	- Air Minum Galon	12.0 BLN	1,100,000	13,200,000	
	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			40,261,000	
521811	- Keperluan Sehari hari Perkantoran Lainnya	1.0 THN	40,261,000	40,261,000	RM
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			74,196,000	
521111	- Biaya Keperluan Seharihari Perkantoran lebih dari 40 pegawai	54.0 OT	1,374,000	74,196,000	RM
	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>			1,347,607,000	
521114	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			137,957,000	RM
	- Langganan Internet	1.0 THN	133,957,000	133,957,000	
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			14,700,000	
522111	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12.0 BLN	1,225,000	14,700,000	RM
	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			168,000,000	
522112	- Langganan Listrik	12.0 BLN	14,000,000	168,000,000	RM
	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			18,000,000	
522141	- Langganan Telepon	12.0 BLN	1,500,000	18,000,000	RM
	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			1,008,950,000	
	- Sewa Mesin Fotocopy	17.0 UNIT	59,290,000	1,007,930,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan (1 Org x 1 Keg)	1.0 OK	1,020,000	1,020,000	
523111	<u>PEMELIHARAAN KANTOR</u>			750,577,000	RM
	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			414,915,000	
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	1810.0 M2/TH	210,000	380,100,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	3165.0 M2/TH	11,000	34,815,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			68,930,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Dinas	610.0 M2/TH	113,000	68,930,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			266,732,000	RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	8.0 UNIT	23,500,000	188,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	8.0 UNIT	1,100,000	8,800,000	
	- Pemeliharaan Komputer	5.0 UNIT	730,000	3,650,000	
	- Pemeliharaan LaptopNotebook	15.0 UNIT	300,000	4,500,000	
	- Pemeliharaan Printer	12.0 UNIT	940,000	11,280,000	
	- Pemeliharaan AC Split	21.0 UNIT	600,000	12,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB	(005)	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG	(01)	Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA	(547678)	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
ALOKASI	Rp.14,562,997,000	

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D 521115	- Pemeliharaan Genset	1.0 UNIT	4,802,000	4,802,000	RM
	- Bahan Bakar Genset	310.0 L/THN	10,000	3,100,000	
	- Bahan Bakar Kendaraan Sewa	3.0 UNIT	10,000,000	30,000,000	
	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			72,200,000	
	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			52,200,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	850,000	10,200,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	500,000	6,000,000	
521119	- Honor Staf Pengelola Keuangan (3 ORG X 12 BLN)	36.0 OB	300,000	10,800,000	RM
	- Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN (Tingkat Korwil) 2 ORG x 12 BLN [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	300,000	7,200,000	
	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			20,000,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (1 Stel x 40 Org)	40.0 STEL	500,000	20,000,000	
E 522141	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DAN HAKIM ADHOC			66,150,000	RM
	<u>Belanja Sewa</u>			66,150,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim dan Hakim Adhoc (4 org x 1 Th)	4.0 OT	16,200,000	64,800,000	
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim dan Hakim Adhoc (1 org x 1 Th)	1.0 OT	1,350,000	1,350,000	
F 521119	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN			10,800,000	RM
	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			10,800,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Kudapan (60 ORG x 3 KEG)	180.0 OK	20,000	3,600,000	
	- Makan (60 ORG x 3 KEG)	180.0 OK	40,000	7,200,000	
G 521119	RAPAT KOORDINASI INTERNAL			35,400,000	RM
	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			35,400,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Kudapan (59 ORG x 10 KEG)	590.0 OK	20,000	11,800,000	
	- Makan (59 ORG x 10 KEG)	590.0 KEG	40,000	23,600,000	
H 524111	KOORDINASI KE PUSAT DAN RAKERNAS			121,680,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			121,680,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang Harian (3 ORG x 2 HARI X 15 KEG)	90.0 OH	300,000	27,000,000	
	- Tiket (3 ORG x 1 PP x 15 KEG)	45.0 OK	1,100,000	49,500,000	
J 524113	- Penginapan (3 ORG x 1 HARI x 15 KEG)	45.0 OH	854,000	38,430,000	RM
	- Transport Riil (3 ORG x 1 PP x 15 KEG)	45.0 OK	150,000	6,750,000	
	KONSULTASI KE KPPNKANWILKPKNL			300,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			300,000	
	(KPPN.017-Bandar Lampung)				
	- Uang Harian (3 ORG x 1 pp x 1 KEG)	3.0 OK	100,000	300,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (547678) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
ALOKASI Rp.14,562,997,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	PENCEGAHAN VIRUS COVID-19			113,320,000	
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			101,920,000	RM
	- Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh [78 Org x 9 Tb]	702.0 OT	75,000	52,650,000	
	- Masker Sekali Pakai	4.0 PAK	450,000	1,800,000	
	- Masker Kain [78 Org x 6 Bh x 6 Bln]	2808.0 Org	15,000	42,120,000	
	- Hand Sanitizer	50.0 Bh	107,000	5,350,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			11,400,000	RM
	- Jasa Penyemprotan Desinfektan [4 KEG x 3 BLN]	12.0 KEG	950,000	11,400,000	
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			565,000,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</u>			565,000,000	
1071.951	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</u>	1.0 Layanan		565,000,000	
	Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG				
1071.951.001	Tanpa Sub Output			565,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			25,000,000	
A	<i>Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan</i>			25,000,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			25,000,000	RM
	- PC Komputer untuk Panitera	2.0 UNIT	12,500,000	25,000,000	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			244,000,000	
A	<i>tanpa sub komponen</i>			244,000,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			244,000,000	RM
	- Layar Proyektor	2.0 UNIT	1,500,000	3,000,000	
	- Web Cam/Kamera Konferensi	1.0 UNIT	11,000,000	11,000,000	
	- 3D Acrylic	1.0 SET	5,000,000	5,000,000	
	- Kursi Kerja Pimpinan	10.0 UNIT	5,000,000	50,000,000	
	- Sice	2.0 SET	10,000,000	20,000,000	
	- AC Split	5.0 UNIT	5,000,000	25,000,000	
	- AC Standing	2.0 UNIT	15,000,000	30,000,000	
	- Kursi Staff	10.0 UNIT	3,500,000	35,000,000	
	- Mobile File Arsip	2.0 UNIT	25,000,000	50,000,000	
	- Meja Kerja	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	
	- Proyektor	1.0 UNIT	5,000,000	5,000,000	
054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			296,000,000	
B	<i>Pemasangan Interior dan Granit</i>			296,000,000	
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.017-Bandar Lampung)			296,000,000	RM
	- Perencanaan	1.0 KEG	10,000,000	10,000,000	
	- Pemasangan Interior dan Granit Aula	331.0 M2	592,000	195,952,000	
	- Renovasi Ruang PTSP	169.0 M2	528,000	89,232,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

(005)

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG

(01)

Badan Urusan Administrasi

UNIT KERJA

(547678)

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

ALOKASI

Rp.14,562,997,000

Halaman : 7

[illegible]

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Bandar Lampung, 12 Desember 2020



Hendriansyah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c